

Media (bulan majalah ikuw)

Volume 14 Nomor 2 April - Juni 2009

MEDIA  
KOMUNIKASI  
TRIWULANAN

# Warta Bappeda

Provinsi Jawa Barat



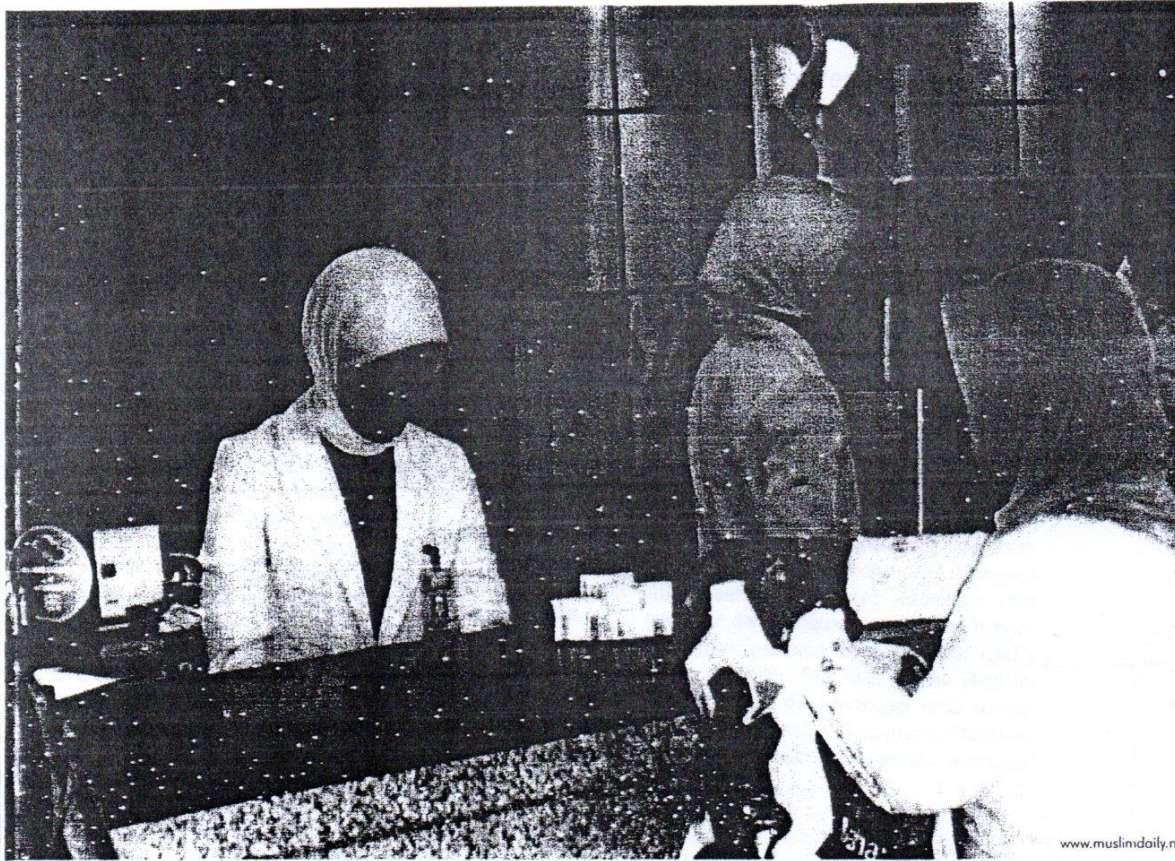
Pembangunan  
Perdesaan  
Melalui Pendekatan  
Model Desa Membangun

ISSN 0216-6232



770216 623256

[www.bappeda.jabarprov.go.id](http://www.bappeda.jabarprov.go.id)



www.muslimdaily.net

# MEMBANGUN PERDESAAN: PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH

Atih Rohaeti Dariah\*

## Pendahuluan

Dimensi pembangunan dari sudut wilayah terkait dengan lokasi secara fisik, sehingga terdapat pembangunan wilayah perdesaan dan perkotaan, sedangkan dimensi berdasarkan jenis problematik meliputi pertumbuhan atau pemerataan. Problematik terbesar yang dihadapi negara-negara berkembang adalah lingkaran kemiskinan. Persentase tingkat kemiskinan di Indonesia lebih tinggi di perdesaan, mencapai 21.9% dari total angka kemiskinan (BPS, 2006). Mereka yang keluar dari perdesaan atau sektor pertanian namun tidak memiliki akses terhadap kegiatan ekonomi produktif di perkotaan atau sektor non-pertanian melahirkan komunitas miskin pula di perkotaan. Dengan demikian terjadi korelasi komunitas miskin di perdesaan dengan di perkotaan. Kondisi tingkat kemiskinan yang memprihatinkan ini seyogyanya dijadikan dorongan besar untuk membuat blue print pembangunan ekonomi perdesaan.

Perjalanan pembangunan perdesaan di Indonesia sudah terselenggara melalui berbagai program. Namun hasilnya sampai saat ini belum optimal. Jamal (2008) mengkritisi bahwa persoalan pokoknya karena ketakotakotanya pembiayaan pembangunan pada berbagai departemen dan institusi serta tidak adanya satu kekuatan yang dapat memaksakan terjadinya integrasi antara berbagai program. Hal senada ditegaskan Yadi (2007) dalam Jamal (2008) bahwa rujukan baku tentang bagaimana pembangunan perdesaan harus dilaksanakan dan menjadi rujukan bagi semua pelaku pembangunan itu sendiri sampai saat ini belum dapat diwujudkan.

Terdapat pengalaman menarik dari pelaksanaan konsep pembangunan desa terpadu (*Integrated Rural Development*) di Nusa Tenggara Timur. Pembangunan desa terpadu dimulai pada awal tahun 1970 untuk menjawab ketertinggalan, kebodohan maupun kemiskinan desa, sekaligus menciptakan wilayah dan penduduk desa yang modern dan maju. Untuk itu ditempuh pendekatan

\* Ketua Prodi Ilmu Ekonomi UNISBA

perencanaan terpusat dengan tujuan agar keterpaduan berbagai sektor dapat dicapai. Namun setelah 35 tahun pembangunan pedesaan dilancarkan tingkat kemiskinan di NTT masih saja nampak, bahkan data tahun 2005 memperlihatkan tingkat kemiskinan rumah tangga sebesar 58% rumah tangga miskin.

Djoeroemana, dkk mengungkapkan bahwa pembangunan pedesaan terpadu telah gagal dalam memperbaiki kehidupan masyarakat pedesaan karena bersifat sentralis, teknokratis, dan fokusnya sempit dalam meningkatkan produksi pertanian. Upaya-upaya masa lalu telah gagal karena tidak menghiraukan tindakan berkelanjutan, konteks lokal, pembangunan kapasitas lokal, dan partisipasi masyarakat. Djoeroemana, dkk mengajukan pendekatan alternatif untuk pembangunan pedesaan terpadu yang menekankan pembangunan kapasitas masyarakat dan keberlanjutan. Mereka menyadari bahwa pembangunan pedesaan terpadu harus mencakup sektor fisik, sosial-budaya, ekonomi dan politik. Diperlukan pendekatan alternatif yang disebut penghidupan masyarakat desa yang berkelanjutan dalam konteks ekologi, sosial budaya, ekonomi, dan politik. Pendekatan ini memberi peluang kepada masyarakat desa baik sebagai individu maupun sebagai kelompok untuk memperkuat kemampuannya bagi pengembangan aset yang ia miliki dan dinamika yang ada menjadi mampu ditransformasikan dalam rangka Pengembangan Penghidupan Desa yang Berkelanjutan Terpadu.

## Tipologi Desa dan Model Pembangunan Desa

Sebelum memberikan *treatment* seperti apa dan bagaimana grand design pembangunan pedesaan, perlu dielaborasi terlebih dahulu karakteristik desa yang ada. Terdapat beberapa pendekatan dalam menentukan tipologi desa, namun secara umum mengerucut pada tiga tipologi yang menunjukkan hierarki. Metode analisis skalogram, *Principal Component Analysis*, dan *skoring* menghasilkan tipologi I desa dengan tingkat perkembangan maju, Tipologi II desa dengan tingkat perkembangan sedang, dan Tipologi III desa dengan tingkat perkembangan rendah.

Berbasis karakteristik ekonomi menunjukkan tipologi Desa Agrobisnis, Desa Agroindustri, Desa Pariwisata, dan Desa Industri Non-Pertanian. Sementara berdasarkan pertimbangan aspek Otonomi desa, keragaman, demokrasi dan kerakyatan, kesejahteraan dan keadilan, terdapat *Desa Asli*, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, *Desa Praja*, berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang diserahkan oleh Pemerintah, *Desa Swapraja* berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang diserahkan oleh Pemerintah dan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa. Bappeda Jabar (2007) dengan menggunakan indikator fisik dan sosial ekonomi mengklasifikasikan desa sebagai desa tertinggal, desa sedang dan DPP (Desa Pusat Pertumbuhan). Masing-masing klasifikasi memiliki karakteristik secara umum sebagaimana terungkap dalam tabel di bawah ini.

Tabel 1. Klasifikasi Desa di Jawa Barat

Tertinggal (DT)	Infrastruktur jalan buruk, tidak tersedia fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan menengah, perbankan atau lembaga keuangan lainnya.	Kondisi perumahan mayoritas kurang layak huni dan kurang bersih. Terdapat tokoh-tokoh masyarakat yang memiliki dedikasi untuk kemajuan desa, namun tidak muncul dan terorganisasi dalam kelembagaan yang stabil dan mantap.	Sektor pertanian sangat dominan, namun terdapat upaya manufaktur berbahan baku lokal dalam skala industri rumahtangga. Aktivitas sektor perdagangan masih rendah, hanya terdapat beberapa warung kecil.
Sedang (DS)	Infrastruktur jalan relatif lebih baik dibandingkan DT, akses lebih mudah terhadap fasilitas kesehatan, pendidikan menengah, perbankan atau lembaga keuangan lainnya.	Terdapat tokoh-tokoh masyarakat yang memiliki dedikasi untuk kemajuan desa, namun tidak muncul dan terorganisasi dalam kelembagaan yang stabil dan mantap.	Sektor pertanian sangat dominan, namun terdapat upaya manufaktur berbahan baku lokal dalam skala industri rumahtangga. Aktivitas sektor perdagangan lebih nampak dibandingkan dengan DT.
Pusat Pertumbuhan (DPP)	Tersedianya fasilitas publik baik pendidikan, kesehatan maupun perbankan. Jalan desa tersedia dan relatif baik. Terdapat pasar dan terminal	Terdapat tokoh-tokoh masyarakat yang kreatif, berdedikasi tinggi untuk kemajuan desa, dan produktif. Partisipasi tokoh tercermin dalam keaktifannya memimpin kelembagaan yang ada, seperti Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), Lumbung Pangan Masyarakat Desa (LPMDS), Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), dan Karang Taruna.	Secara umum selain sektor pertanian dan atau manufaktur, aktivitas sektor perdagangan sangat nampak yang memasok kebutuhan masyarakat desa dan desa tetangganya. Kondisi perumahan mayoritas layak huni dan bersih.

## Model Pembangunan Desa Tertinggal : Kolaborasi Inisiatif

Dengan adanya klasifikasi di atas memudahkan mengarahkan pola pembangunan sesuai karakteristik masing-masing. Bagan-bagan di bawah ini merupakan alternatif model pembangunan perdesaan yang ditawarkan penulis.

Komponen inti dalam pembangunan berangkat dari kondisi fisik, sosial dan ekonomi yang telah dijelaskan dalam Tabel 1. Berdasarkan hasil survey pada 10 desa tertinggal di Jawa Barat, dapat teridentifikasi kebutuhan pembangunan fisik utama adalah akses jalan yang memadai, listrik dan air bersih.

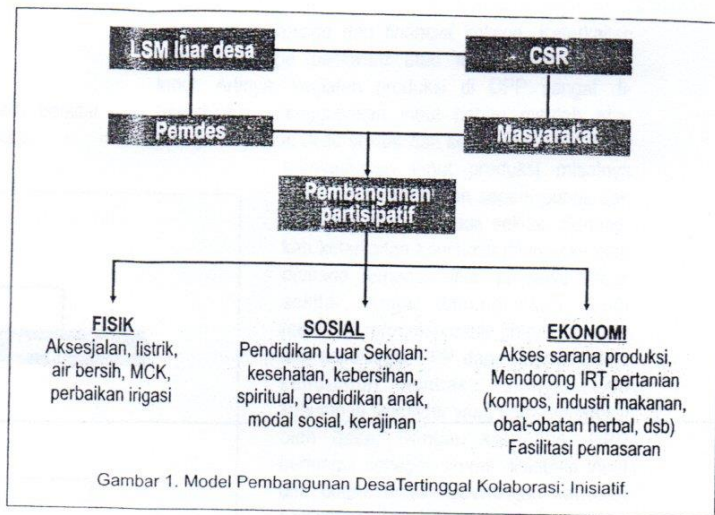
Kondisi sosial pun memprihatinkan, ditunjukkan dengan tingkat pendidikan yang rendah. Pemahaman tentang pendidikan, kesehatan, kebersihan yang kurang memadai. Dengan demikian dibutuhkan *social learning* yang berkelanjutan, sehingga terjadi perubahan persepsi dan sikap terhadap pendidikan, kesehatan, kebersihan dan yang lainnya. Pembangunan kapasitas SDM ini ke depannya diharapkan akan membentuk human capital perdesaan yang memiliki motivasi dan ide untuk maju dan berkembang. Keberadaan modal sosial ditempatkan sebagai media untuk melakukan *collective action* pembangunan perdesaan.

Dari aspek ekonomi, sekalipun kegiatan dominan pada sektor pertanian, terdapat aktivitas industri rumah tangga yang menghasilkan makanan olahan seperti di desa Sukasari ternyata sebagian petani atau buruh tani merangkap sebagai pembuat pindang ikan terutama ikan bandeng.

Berdasarkan pengamatan di lapangan, kegiatan pengolahan makanan berbasis sumberdaya lokal di desa-desa yang terkategori tertinggal tersebut masih tradisional, dilakukan seadanya sebagai warisan generasi sebelumnya, yakni penjual menunggu pembeli datang ke tempat atau melalui pengumpul lokal yang selanjutnya dipasarkan ke pasar tradisional lokal. Karena itu diperlukan fasilitasi pemasaran dengan jalur yang lebih pendek.

## Model Pembangunan Desa Sedang: Kolaborasi Kreatif

Orientasi pembangunan diarahkan pada pengembangan kondisi fisik, sosial dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagai status

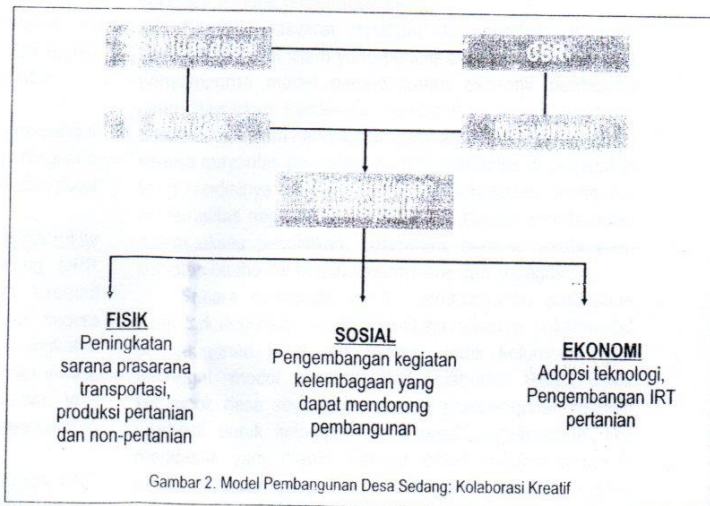


Gambar 1. Model Pembangunan Desa Tertinggal Kolaborasi: Inisiatif.

hinterland, penyangga desa pusat pertumbuhan, orientasi pembangunan sektoral desa sedang sebagai penghasil tanaman pangan adalah meningkatkan produksi melalui adopsi teknologi dan pemasaran bersama. Kegiatan industri mikro dan kecil perlu dikembangkan dengan memanfaatkan segala sumberdaya yang ada di DPP. Kolaborasi dan partisipatif tetap menjiwai model ini sama halnya dengan kasus desa tertinggal. Kondisi fisik dan sosial yang lebih baik dibandingkan dengan desa tertinggal akan mempercepat proses kolaborasi dan partisipatif.

Desa sedang dalam konteks kawasan perdesaan terletak di sekitar desa pusat pertumbuhan dan berbatasan langsung dengan desa tertinggal. Artinya, secara lokasi memiliki peran mediasi menyerap sumberdaya yang ada di pusat pertumbuhan untuk pembangunannya yang selanjutnya memberikan *multiplier effect* bagi desa tertinggal.

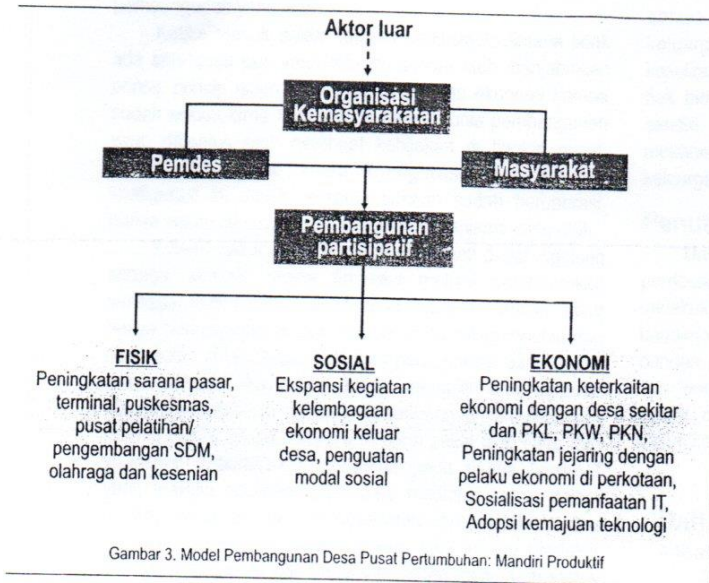
Pembangunan untuk kasus desa sedang adalah mempertahankan dan meningkatkan karya-karya nyata sehingga mendorong penambahan kesempatan kerja. Karenanya dinamakan model "Kolaborasi Kreatif". Dalam model ini poin-poin dari model standar sektoral mulai dapat disisipkan, diantaranya potensi adopsi teknologi dan penguatan kelompok tani, diarahkan orientasi pasar atau komersial. Introduksi alternatif pertanian organik dapat dilakukan melalui pemberian insentif, misalnya subsidi biaya produksi dan jaminan pasar.



Gambar 2. Model Pembangunan Desa Sedang: Kolaborasi Kreatif

## Model Pembangunan Desa Pusat Pertumbuhan : Mandiri Produktif

Sementara untuk pembangunan DPP lebih bersifat ekstensi dan meningkatkan keterkaitan dengan kota.



Gambar 3. Model Pembangunan Desa Pusat Pertumbuhan: Mandiri Produktif

Berdasarkan analisa SWOT diperoleh gambaran sebagai berikut:

- Secara umum seluruh DPP yang disurvei telah berperan sebagai pusat pelayanan sekalipun dengan tingkat pelayanan yang beragam dan belum optimal.
- Secara umum seluruh DPP yang disurvei belum berperan sebagai pusat pertumbuhan, bahwasannya keterkaitan ekonomi terutama keterkaitan produksi dengan *hinterland* sangat rendah.
- Secara umum kewenangan seluruh DPP yang disurvei dalam hal pengaturan, pemberdayaan, pelayanan pengelolaan potensi wilayah desa, kemasyarakatan, tata kehidupan desa, aparat desa untuk pencapaian pendidikan, kesehatan dan ekonomi sangat terbatas.

Dengan demikian model optimalisasi pengembangan DPP diarahkan sebagai upaya-upaya konkrit peningkatan DPP sesuai fungsinya sebagai pusat pelayanan dan pusat pertumbuhan, yakni:

1. Peningkatan fungsi pelayanan publik dan infrastruktur sesuai kebutuhan karakteristik masing-masing DPP. Kebutuhan peningkatan fasilitas pelayanan tersebut beragam, terdapat DPP yang membutuhkan segera pengadaan pasar, di lain pihak kebutuhan peningkatan status terminal, perbaikan infrastruktur jalan dan irigasi, penambahan sekolah menengah, akses internet, jasa konsultasi pengembangan usaha, pusat pengembangan seni dan kemasyarakatan.
2. Menciptakan keterkaitan ekonomi. Keterkaitan antar DPP dengan desa satelit dapat berbentuk *production linkage*,

*consumption linkage* dan *financial linkage*. Keterkaitan produksi berupa *'backward'* atau *'forward'* bagi supply input. Artinya, kegiatan produksi di DPP sangat dimungkinkan menggunakan input bahan mentah atau tenaga kerja dari desa sekitar dan sebaliknya DPP dapat menyediakan input produksi misalnya untuk sektor pertanian seperti pupuk dan obat-obatan untuk desa sekitar. Sedangkan keterkaitan konsumsi ditunjukkan oleh *demand* terhadap *final products*. Desa sekitar sangat dimungkinkan dapat memasok produk-produk primer ke DPP dan sebaliknya DPP dapat menyediakan kebutuhan sembako lainnya serta kebutuhan sekunder yang tidak diproduksi oleh desa. Dengan kata lain, DPP berfungsi sebagai simpul distribusi input dan output untuk kepentingan kawasan perdesaan dan keluar desa. Sementara keterkaitan keuangan tercermin pada kegiatan simpan pinjam antara masyarakat desa sekitar dengan bank atau lembaga keuangan lainnya yang ada di DPP.

3. Mempercepat pelimpahan kewenangan pengaturan, pemberdayaan, pelayanan pengelolaan potensi wilayah desa, kemasyarakatan, tata kehidupan desa, aparat desa untuk pencapaian pendidikan, kesehatan dan ekonomi.

## Perspektif Islam

Seluruh model pembangunan ekonomi perdesaan yang ditawarkan pada bagian sebelumnya membutuhkan sebuah *necessary condition* (kondisi prasyarat), agar dapat mencapai sarannya yakni kesejahteraan, keadilan dan kebahagiaan. Kondisi prasyarat tersebut nampaknya alpa (terlupakan) dalam model-model ekonomi konvensional, sehingga upaya perbaikan dan penyempurnaan konsep pembangunan tidak akan pernah sampai pada sasaran jika kondisi prasyarat tidak terpenuhi.

Kondisi prasyarat dipenuhi dari sumbangsih pendekatan ekonomi Islam yang penulis coba seitakan sebagai penyempurna model pembangunan ekonomi perdesaan yang ditawarkan. Perdesaan mendapat porsi perhatian lebih dan khusus dalam pendekatan pembangunan ekonomi Islam karena mayoritas penduduk muslim bermukim di perdesaan yang kondisinya saat ini sangat memprihatinkan, menerima eksternalitas negatif dari ketidakadilan berupa keterbatasan dalam akses pendidikan, kesehatan, sumber pembiayaan kegiatan usaha, air bersih, energi listrik dan sebagainya.

Secara mekanistik model pembangunan perdesaan tetap terkategori sesuai klasifikasi desanya, yakni model pembangunan kolaborasi inisiatif untuk kelompok desa tertinggal, model pembangunan kolaborasi kreatif untuk kelompok desa sedang dan model pembangunan mandiri produktif untuk kelompok desa pusat pertumbuhan. Hal mendasar yang harus muncul untuk menyempurnakan model tersebut yang belum disinggung secara eksplisit adalah bahwa akidah atau iman merupakan asas pem-

bangunan yang paling fundamental. Asas ini menegaskan bahwa manusia sebagai pemegang amanah Allah bertanggungjawab untuk memakmurkan alam dan mengurusnya dengan cara yang paling baik dan seksama. Selanjutnya dalam proses pembangunan yakni pemanfaatan seluruh sumberdaya harus tetap bersandar pada nilai-nilai yang digariskan oleh Alqur'an dan Sunnah untuk mencapai hasil pembangunan yang adil.

Ketika masuk dalam tataran praktisnya, dimana tidak ada satu desa pun yang mampu secara utuh menjalankan prinsip-prinsip islam dalam pembangunan ekonomi karena sudah sekian lama terbelenggu dalam dunia pembangunan yang dibentuk oleh pembuat kebijakan di tingkat pusat, berarti dibutuhkan suatu konfigurasi baru. Potensi konfigurasi ini sudah tersedia bahkan sudah beroperasi, hanya belum dikemas dalam sebuah mekanisme yang utuh.

Potensi zakat mal, infaq dan shodaqoh dapat digalang sebagai sumber modal finansial melalui pembentukan lembaga amil zakat di perdesaan. Saat ini urusan zakat hanya berlangsung di saat idul fitri yakni pengumpulan dan penyaluran zakat fitrah. Mengacu pada prinsip uang dalam islam sebagai flow yang harus mengalir dan berputar diantara masyarakat karena uang sesungguhnya merupakan barang publik, maka penyaluran dana zakat mal, infaq dan shodaqoh sepatantnya diarahkan pada usaha produktif yang mampu dilakukan oleh para mustahiq selain dalam bentuk pemberian bantuan kesehatan dan pendidikan atau konsumsi lainnya. Agar penyaluran untuk usaha produktif bisa berjalan lancar dan secara perlahan mengubah status mustahiq menjadi muzaki (tidak miskin lagi), dibutuhkan

pendampingan sebagai wahana konsultasi dan advokasi usaha. Di sinilah ajaran islam tentang persaudaraan, saling memberi, saling memperhatikan akan menjadi ruh kegiatan pendampingan.

Terkait dengan keberadaan kaum muzaki yang berwirausaha yang menggunakan jasa tenaga kerja mustahik dalam proses produksinya, diperlukan penegakan bahwa buruh tenaga kerja merupakan bagian dari keluarganya, majikan bertanggungjawab atas segala kesulitan dan kebutuhan pokoknya. Dengan demikian hak-hak hidup mustahiq yang 'kebetulan' tidak bisa berusaha sendiri dapat dijamin oleh majikannya. Artinya, terjadi mekanisme hubungan majikan buruh yang bersifat 'kekeluargaan dan melindungi pekerja dari ketidakadilan.

### Penutup

Untuk mewujudkan model pembangunan ekonomi perdesaan, tampaknya perlu sebuah simulasi. Namun untuk melakukan simulasi, sebelumnya harus terpetakan dulu bagaimana *positioning* seluruh stakeholders yang terkait dengan pembangunan perdesaan. *Positioning* di sini mulai dari pemahaman, persepsi, ketertarikan, keinginan dan hasrat dalam mewujudkan pesan Alqur'an dan Sunnah dalam kegiatan pembangunan perdesaan.

### Daftar Pustaka

- Adisasmita, Rahardjo. 2006. *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*. Penerbit Graha Ilmu, Yogyakarta, 2006.
- Bapeda Jabar, 2006. *Metodologi Identifikasi dan Klasifikasi Desa Tertinggal Dan Desa Pusat Pertumbuhan Di Jawa Barat*. Tidak Dipublikasikan.
- Bapeda Jabar. 2002. *Profil Perekonomian Jawa Barat*. Badan Perencanaan Daerah.
- Chapra, Umar. 2000. *Islam dan Pembangunan Ekonomi*. Penerbit Gema Insani, Jakarta, 2001.
- Djoeroemana, Siliwoloe. Dkk. *Pembangunan Pedesaan Terpadu Di Nusa Tenggara Timur: Tinjauan Terhadap Kesempatan, Kendala Dan Pilihan Untuk Meningkatkan Matapencaharian*. Paper Dipersentasikan Dalam Workshop Identifikasi Penghidupan Masyarakat Secara Berkelanjutan, Kupang. 2006.
- Djoeroemana, Siliwoloe. Dkk. *An overview of environmental, sociocultural, economic and political aspects of rural development in East Nusa Tenggara*. Paper Dipersentasikan Dalam Workshop Identifikasi Penghidupan Masyarakat Secara Berkelanjutan, Kupang. 2006.
- Fatah, Luthfi. 2006. *Dinamika Pembangunan Pertanian dan Perdesaan*. Penerbit Pustaka Bauna, Banjarbaru. 2006.
- Jamal, Erizal. 2008. *Kajian Kritis Terhadap Pelaksanaan Pembangunan Perdesaan di Indonesia*. Forum Penelitian Agroekonomi, Volume 26 No. 2 Tahun 2008.
- Rahmalia, Evi. *Kajian Tipologi Desa Di Kota Bandar Lampung*. 2005. [www.damandiri.or.id/detail.php](http://www.damandiri.or.id/detail.php).
- Syahyuti, 2007. *Kebijakan Pengembangan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Sebagai Kelembagaan Ekonomi Di Perdesaan*, <http://pse.litbang.deptan.go.id/ind/pdf/ISU5-1b.pdf>.

